

## DETERMINAN KESEJAHTERAAN BERDASARKAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) DI PROVINSI BALI

Gede Agus Dian Maha Yoga  
Universitas Hindu Indonesia  
dionmahayoga@unhi.ac.id

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), jumlah penduduk, belanja pemerintah dan pengangguran terhadap kesejahteraan berdasarkan kualitas Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Data yang digunakan adalah data skunder periode 2013 - 2022 yang diperoleh dari kabupaten dan kota di Provinsi Bali (data panel). Penelitian ini diuji menggunakan *software Econometric Views (Eviews)* (regresi data panel). Hasil yang diperoleh PDRB dan belanja pemerintah, berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas IPM, sedangkan pertumbuhan jumlah penduduk tidak berpengaruh terhadap kualitas IPM di Provinsi Bali 2013 - 2022. Tingkat pengangguran berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kualitas IPM di Provinsi Bali 2013 - 2022.

**Kata Kunci : Belanja Pemerintah, Indeks Pembangunan Manusia, Jumlah Penduduk, Pengangguran, Produk Domestik Regional Bruto**

### ABSTRACT

*This research aims to determine the influence of Gross Regional Domestic Product (GRDP), population, government spending and unemployment on welfare based on the quality of Human Development Index (HDI). The data used is secondary data for the 2013-2022 period obtained from regencies and cities in Bali Province (panel data). This research was tested using Econometric Views (Eviews) software (panel data regression). The results obtained by GRDP and government spending have a significant positive effect on the quality of the HDI, while population growth has no effect on the quality of the HDI in Bali Province 2013 - 2022. The unemployment rate has a negative and significant effect on the quality of the HDI in Bali Province 2013 - 2022.*

*Keywords : Gross Regional Domestic Product, Government Spending, Human Development Index Population, Unemployment*

### PENDAHULUAN

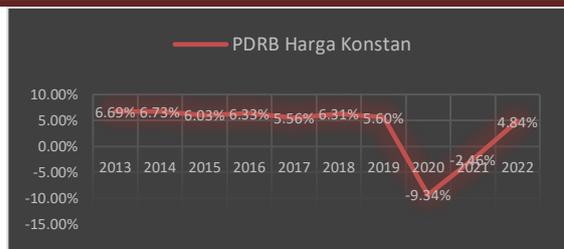
Pasca pandemi covid - 19 pertumbuhan ekonomi Bali yang terlihat melalui pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), mengalami pertumbuhan yang progresif (Gambar 1). Kembali pulihnya sektor pariwisata dalam hal ini berkontribusi positif terhadap laju pertumbuhan ekonomi Bali. Tidak dapat dipungkiri sektor pariwisata masih mendominasi dalam memperkuat perekonomian Bali. Kendati demikian, kedepan Bali sebagai Daerah Tujuan Wisata (DTW) dunia, hendaknya tidak hanya bergantung pada sektor pariwisata saja (Purwahita et al., 2021)

Hal tersebut didasarkan atas berbagai fenomena yang sudah terjadi pada masa covid - 19 yang menimpa Bali pada masa itu, dimana ketika sektor pariwisata mengalami resesi seharusnya bisa ditopang oleh sektor - sektor lainnya. Arah pembangunan Bali kedepan hendaknya lebih menyeimbangkan sektor

pariwisata dengan berbagai sektor lainnya, agar ketimpangan kontribusi PDRB antara sektor pariwisata dengan sektor lain tidak terlampau jauh. Harapannya Bali tidak kembali terpuruk seperti pada masa covid - 19 apabila kembali terjadi risiko global (Oktaviana et al., 2023).

Covid - 19 berdampak sangat buruk bagi perekonomian Bali. Gambar 1, memperlihatkan PDRB harga konstan Bali tahun 2013 - 2022, mengalami kontraksi terdalam pada tahun 2020 sebesar -9,34 persen dan 2021 sebesar -2,46 persen. Indikasinya hal ini berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat yang juga mengalami penurunan. Hal tersebut didasarkan atas studi empiris, tingginya jumlah masyarakat Bali yang bergantung disektor pariwisata kehilangan pekerjaan, dan pendapatan (Info bank news, n.d.).

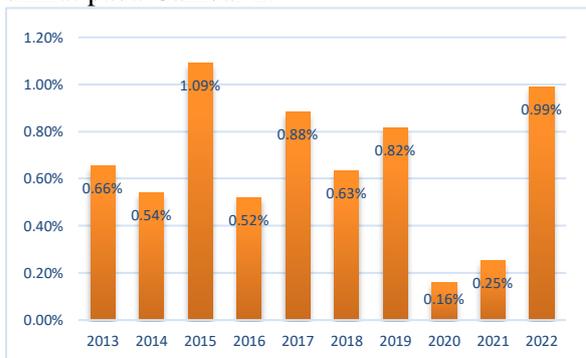




**Gambar 1. PDRB Harga Konstan Provinsi Bali 2013 - 2022 (Persen %)**

Sumber : BPS (2023)

Dalam melihat tingkat kesejahteraan masyarakat, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator ideal, karena mengkombinasikan aspek kesejahteraan antara lain, pendidikan, kesehatan (harapan hidup) dan pendapatan. Dalam menjamin aspek pendidikan dan kesehatan, pendapatan rumah tangga masyarakat menjadi aspek penting sehingga stabilitasnya harus tetap terjaga (Statistik, 2020). Covid - 19 secara nyata mengganggu stabilitas pendapatan perkapita rumah tangga masyarakat Bali, yang berdampak menurunnya IPM tahun 2020 - 2021 di angka 0,16 dan 0,25 persen dapat dilihat pada Gambar 2.



**Gambar 2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Bali 2013-2022 (Persen %)**

Sumber : BPS (2023)

Menurunnya IPM sebagai indikator kesejahteraan masyarakat Bali tidak dapat dianggap sebagai masalah sederhana. Pertumbuhan IPM pasca pandemi covid - 19 dan dimasa mendatang harus ditingkatkan. Stimulus untuk mengembangkan sektor - sektor selain pariwisata merupakan langkah yang dianggap tepat untuk menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi Bali dan sekaligus sebagai upaya pengendalian risiko global seperti covid - 19. Harapannya pertumbuhan ekonomi Bali melalui PDRB, kontribusi sektor - sektor potensial seperti pertanian, UMKM, jasa dan lain - lain dapat bertumbuh (Utami, 2020).

Selain pertumbuhan ekonomi, laju pertumbuhan penduduk merupakan hal yang dapat mempengaruhi tingkat IPM. Semakin tinggi jumlah penduduk, tanpa diikuti oleh peningkatan lapangan kerja yang signifikan, akan berakibat rendahnya IPM dan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat di kota - kota besar yang mengalami *over population* tidak hanya berdampak terhadap menurunnya kualitas IPM tetapi juga akan menimbulkan berbagai permasalahan sosial baru seperti pengangguran (Darnawaty & Purnamasari, 2019)

Pengangguran juga merupakan salah satu penyebab rendahnya tingkat IPM. Tingginya jumlah angka pengangguran mencerminkan rendahnya akses terhadap pendapatan untuk menciptakan kondisi pemenuhan pendidikan yang layak dan kesehatan yang baik. Pengangguran selalu menjadi masalah klasik bagi setiap daerah terlebih Bali yang baru dilanda covid - 19 dan menciptakan ledakan pengangguran. Berbagai upaya pemerintah dalam peningkatan ekonomi masyarakat hendaknya diprioritaskan terlebih dahulu terhadap permasalahan fundamental seperti pengangguran dan lapangan kerja (Ningrum et al., 2020).

Peran pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas IPM sebagai ukuran kualitas kesejahteraan, merupakan upaya strategis, dalam rangka pembangunan ekonomi daerah. Alokasi belanja pemerintah seyogyanya digunakan sepenuhnya demi kesejahteraan masyarakat sesuai amanat Undang - Undang. Pembangunan dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia kecenderungannya tidak menjadi prioritas, dikarenakan dampaknya tidak dirasakan dalam jangka pendek. Pemerintah Daerah lebih fokus pada pembangunan fisik infrastruktur untuk meninggalkan tonggak monumental dalam masa pemerintahannya (Bakar, 2020).

Faktor - faktor yang mempengaruhi kualitas IPM yang merupakan indikator kesejahteraan berdasarkan permasalahan yang dikemukakan antara lain adalah PDRB, jumlah penduduk, belanja pemerintah dan pengangguran. Berdasarkan uraian latar belakang masalah adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Bagaimanakah pengaruh PDRB, jumlah penduduk, belanja pemerintah dan pengangguran terhadap kesejahteraan?. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab rumusan masalah tersebut dan secara implementatif, harapannya sebagai acuan dalam penentuan kebijakan ekonomi daerah.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Konsep Kesejahteraan Ekonomi

Konsep kesejahteraan ekonomi mencakup semua aspek kehidupan ekonomi seseorang, rumah tangga, atau masyarakat secara keseluruhan. Tidak hanya pendapatan, tetapi mencakup berbagai aspek untuk mencapai tujuan hidup yang diinginkan, akses layanan kesehatan dan pendidikan, keamanan pangan, dan kebebasan finansial. Indikator utama dalam konsep kesejahteraan ekonomi antara lain adalah kesehatan (harapan hidup), pendidikan, dan pendapatan finansial. Dalam kebijakan ekonomi, kesejahteraan digunakan untuk mengidentifikasi masalah yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat dan merancang intervensi yang tepat untuk menanggulunginya.

Dalam mengidentifikasi kesejahteraan, ada beberapa faktor yang memengaruhi variasi tingkat kesejahteraan. Ini termasuk keadaan sosial ekonomi rumah tangga atau masyarakat, struktur kegiatan ekonomi sektoral yang mendasari kegiatan produksi rumah tangga atau masyarakat, potensi regional (sumber daya alam, lingkungan, dan infrastruktur) yang memengaruhi perkembangan struktur kegiatan produksi, dan kondisi kelembagaan yang menyebabkan perbedaan tingkat kesejahteraan.

Hubungan antara kesejahteraan ekonomi dan IPM sangat erat karena keduanya mencerminkan berbagai aspek kesejahteraan manusia. Kesejahteraan ekonomi, yang biasanya diukur dengan pendapatan per kapita atau indeks kekayaan, memberikan gambaran tentang kemampuan ekonomi seseorang atau masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka dan mencapai tujuan hidup yang lebih luas.

### Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah sebuah ukuran komposit yang digunakan oleh Perserikatan Bangsa - Bangsa (PBB) untuk mengukur kemajuan sosial dan ekonomi suatu negara. IPM menggabungkan beberapa indikator untuk memberikan gambaran kesejahteraan manusia yang lebih luas tidak hanya bergantung pada pendapatan atau pertumbuhan ekonomi saja (Putri et al., 2023).

Dalam IPM, ada tiga dimensi utama pembangunan manusia antara lain harapan hidup yang panjang dan sehat, diukur dengan harapan hidup saat lahir, yang dipengaruhi oleh sistem kesehatan dan kondisi lingkungan masyarakat. Akses terhadap pengetahuan diukur dengan rata - rata lama sekolah dan harapan masa depan anak sekolah, yang menunjukkan tingkat pendidikan.

Standar hidup yang layak, adalah ukuran yang didasarkan pada pendapatan riil per kapita dan menunjukkan seberapa mampu seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti, makanan, pakaian, dan tempat tinggal (Ramadanisa & Triwahyuningtyas, 2022).

Berbeda halnya dengan indikator untuk mengukur pertumbuhan ekonomi, IPM memberikan gambaran komprehensif tentang kesejahteraan manusia. Daerah dengan pendapatan tinggi belum tentu memiliki IPM yang tinggi jika terdapat ketimpangan yang signifikan dalam distribusi pendapatan atau akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan. Organisasi internasional menggunakan IPM sebagai alat untuk merencanakan kebijakan pembangunan yang lebih berfokus pada manusia dan untuk melacak kemajuan dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (Mahroji & Nurkhasanah, 2019).

### Konsep Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB adalah indikator ekonomi yang mengukur nilai semua barang dan jasa yang diproduksi di suatu daerah dalam jangka waktu tertentu, biasanya satu tahun. PDRB digunakan untuk menilai kesehatan ekonomi suatu wilayah dan membandingkan kinerja ekonomi antar wilayah. Produk domestik mengacu pada semua barang dan jasa yang diproduksi di wilayah tertentu, tidak peduli oleh siapa yang menghasilkannya. Produk ini dapat berasal dari perusahaan pemerintah, swasta, atau individu. Regional mengacu pada daerah atau wilayah tertentu dan bruto didefinisikan sebagai nilai produksi yang diukur sebelum dikurangi oleh depresiasi atau pengurangan lainnya (Putri, 2020).

PDRB dibagi menjadi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK). PDRB ADHB menunjukkan nilai produksi pada harga yang berlaku pada saat itu, sementara PDRB ADHK menggunakan harga konstan tahun dasar untuk menghilangkan efek inflasi, yang memungkinkan perbandingan waktu yang lebih baik. Ada dua metode yang dapat digunakan untuk menghitung PDRB ADHB. Metode langsung memperhitungkan produksi, pendapatan, dan pengeluaran dan metode tidak langsung dengan membagi nilai tambah ekonomi nasional kemasing-masing ekonomi regional (Yoga & Diputra, 2024).

PDRB ADHB menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu



wilayah namun, karena fluktuasi harga dan perubahan produksi, PDRB ADHB ini bias dalam menunjukkan perubahan nilai. PDRB ADHB menggunakan metode perhitungan sebagai berikut.

1. Revaluasi teknik yang menilai biaya dan output antara masing - masing tahun.
2. Ekstrapolasi teknik yang mengalikan nilai tambah pada tahun dasar dengan indeks produksi.
3. Deflasi teknik yang membagi nilai tambah ADHB untuk indeks harga masing-masing tahun (Azriyansyah, 2022).

### Konsep Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk adalah istilah yang mengacu pada jumlah orang yang tinggal dalam suatu wilayah pada waktu tertentu. Salah satu indikator demografi yang paling penting, jumlah penduduk dapat menunjukkan ukuran dan komposisi populasi suatu daerah. Jumlah penduduk terdiri dari beberapa konsep antara lain adalah jumlah penduduk absolut, laju pertumbuhan penduduk, piramida penduduk, kepadatan penduduk dan mobilitas penduduk (Agustina et al., 2018).

Jumlah penduduk absolut adalah jumlah semua orang yang tinggal di suatu tempat pada saat tertentu. Ini biasanya diukur dalam satuan individu. Laju pertumbuhan penduduk adalah persentase dari perubahan populasi dari waktu ke waktu. Rumus berikut dapat digunakan untuk menghitung laju pertumbuhan populasi :

$$\text{Pertumbuhan Penduduk} = \left( \frac{\text{Jumlah Kelahiran} - \text{Jumlah Kematian}}{\text{Jumlah Penduduk}} \right) \times 100$$

Piramida penduduk adalah representasi grafis dari struktur usia dan jenis kelamin penduduk di suatu wilayah. Piramida penduduk dapat memberikan informasi tentang distribusi usia, tingkat kelahiran, dan tingkat kematian dalam suatu populasi (Suhandi et al., 2018).

Kepadatan penduduk adalah jumlah orang yang tinggal di sebuah wilayah tertentu per satuan luasnya. Rumus berikut digunakan untuk menghitung kepadatan penduduk:

$$\text{Kepadatan Penduduk} = \frac{\text{Jumlah Penduduk}}{\text{Luas Wilayah}}$$

Mobilitas penduduk yaitu perpindahan orang dari satu tempat ke tempat lain, baik di dalam maupun di luar. Dalam perencanaan pembangunan ekonomi, alokasi sumber daya, dan kebijakan sosial ekonomi, konsep jumlah penduduk sangat penting untuk dikaji. Pemerintah sebagai perancang kebijakan dapat menentukan program pemberdayaan strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memahami jumlah penduduk

karakteristik dan budaya penduduk disuatu daerah (Sari & Yusniar, 2019)

### Konsep Belanja Pemerintah

Pengeluaran oleh pemerintah daerah untuk membeli barang dan jasa serta memberikan transfer kepada individu, kelompok dan organisasi dikenal sebagai belanja pemerintah. Konsep ini memiliki dampak signifikan dalam perekonomian daerah, karena merupakan salah satu bentuk intervensi fiskal pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas perekonomian. Dampak ekonomi yang paling sederhana dirasakan langsung oleh masyarakat adalah ketika pemerintah membeli barang dan jasa dari perusahaan swasta atau individu, yang meningkatkan pendapatan mereka, belanja pemerintah dapat meningkatkan konsumsi ekonomi (Sutono, 2022).

Belanja pemerintah dapat berdampak langsung pada perekonomian, terutama melalui pengeluaran untuk program stimulus atau proyek pembangunan. Investasi dalam infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya dapat meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan dalam jangka panjang. Belanja publik adalah alat yang dapat digunakan pemerintah untuk mengontrol siklus ekonomi. Misalnya, mereka dapat meningkatkan belanja untuk meningkatkan permintaan agregat dan mendukung pertumbuhan ekonomi selama periode resesi (Palayukan, 2019).

Namun yang lebih terpenting belanja pemerintah dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui berbagai program dan kebijakan pemberdayaan dalam jangka panjang sehingga akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Misalnya, melalui program bantuan dan pemberdayaan sosial atau subsidi untuk masyarakat yang kurang mampu, peningkatan kualitas layanan kesehatan, pendidikan. Belanja pemerintah juga dapat meningkatkan pendapatan dan pemerataan pendapatan melalui pengadaan perluasan lapangan kerja dan akses terhadap lapangan kerja yang lebih baik (Prakasa & Suparyati, 2022).

### Konsep Pengangguran

Pengangguran adalah ketika seseorang yang memiliki kemampuan dan ingin bekerja tidak dapat menemukan pekerjaan yang sesuai. Dalam perekonomian, pengangguran dapat menunjukkan tingkat kesehatan ekonomi suatu negara dan keefektifan pasar tenaga kerja dalam menyalurkan sumber daya manusia ke sektor - sektor yang paling membutuhkan. Beberapa konsep penting dalam pengangguran antara lain



adalah sebagai berikut. Pertama adalah pengangguran terbuka, kedua pengangguran terselubung, ketiga pengangguran friksional, keempat pengangguran struktural dan kelima pengangguran siklis (Wijayanto & Olde, 2020).

Pengangguran terbuka digunakan untuk menggambarkan individu yang aktif mencari pekerjaan meskipun mereka tidak memiliki pekerjaan saat ini. Pengangguran terbuka sering dianggap sebagai sinyal langsung dari ketidakseimbangan di pasar antara permintaan dan penawaran tenaga kerja. Pengangguran Tersembunyi adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan individu yang memiliki keinginan untuk bekerja tetapi tidak dianggap pengangguran karena mereka telah berhenti mencari pekerjaan atau tidak aktif mencari pekerjaan karena berbagai alasan (Kasna, 2020).

Ketika seseorang berpindah dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain atau dari sekolah ke dunia kerja, mereka mengalami pengangguran sementara yang dikenal sebagai pengangguran fleksibel atau friksional. Sebagian besar orang menganggap pengangguran ini sebagai bagian alami dari proses mencari pekerjaan yang sesuai. Pengangguran karena keterampilan yang tidak sesuai antara yang dibutuhkan pasar tenaga kerja dengan keterampilan yang dimiliki disebut pengangguran struktural. Pengangguran siklis adalah pengangguran yang terjadi selama siklus bisnis, ketika permintaan akan barang dan jasa menurun, yang mengakibatkan penurunan produksi dan jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan oleh perusahaan (Suhandi et al., 2021).

#### **Keterkaitan Variabel**

Laju pertumbuhan PDRB yang positif mencerminkan bahwa disuatu daerah tersebut perputaran roda perekonomian berjalan dengan baik, dari sisi produksi hingga konsumsi. Oleh karena itu pemerintah memiliki lebih banyak sumber daya dari kegiatan ekonomi yang tumbuh signifikan untuk diinvestasikan dalam rangka peningkatan lapangan kerja, sistem pendidikan dan kesehatan yang pada akhirnya akan meningkatkan IPM yang merupakan indikator kesejahteraan. Hal ini didukung oleh penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa PDRB memiliki hubungan yang positif terhadap IPM yang menunjukkan tingkat kesejahteraan (Rinawati et al., 2022). Pertumbuhan ekonomi (PDRB) memungkinkan tercapainya tingkat IPM yang tinggi. Hubungan sebab akibat antara PDRB dan IPM menjadi hubungan yang saling berpengaruh (Taqi et al., 2021).

Kuantitas fluktuasi jumlah penduduk disuatu daerah merupakan potensi yang strategis dalam peningkatan IPM. Agar peningkatan jumlah penduduk berkualitas dan tidak menjadi beban ekonomi, kebijakan dalam hal peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas harus dikedepankan. Modal manusia merupakan syarat utama dalam pembangunan ekonomi dan hendaknya dalam setiap kebijakan pembangunan isu terhadap pembangunan manusia tidak dikesampingkan demi pembangunan yang bersifat fisik. Keterkaitan antara jumlah penduduk terhadap IPM sebagai indikator kesejahteraan didukung oleh penelitian yang dilakukan (Jasasila, 2020) yang menyatakan setiap kenaikan jumlah penduduk akan meningkatkan potensi IPM. Hal yang sama juga dikemukakan oleh (Kiha et al., 2021) yang menyatakan bahwa antara jumlah penduduk dan IPM memiliki hubungan yang kuat.

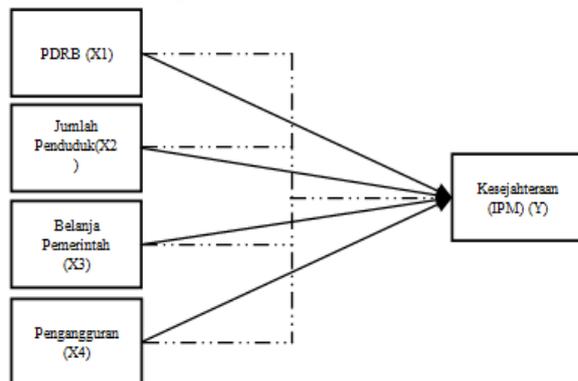
Belanja pemerintah dalam perbaikan infrastruktur kesehatan, pendidikan dan investasi untuk penyediaan lapangan kerja merupakan faktor utama dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia yang diukur melalui IPM dan merupakan indikator kesejahteraan. Semakin efektif penggunaan anggaran pemerintah daerah dalam hal tersebut, akan semakin meningkatkan laju pertumbuhan IPM daerah tersebut. Hubungan positif antara belanja pemerintah dan pertumbuhan IPM dikemukakan oleh (Sidabutar et al., 2020) yang menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah melalui Anggaran Pengeluaran Belanja Daerah (APBD) berkorelasi positif dengan pertumbuhan IPM. Hal yang sama juga dikemukakan oleh (Rahmawati & Intan, 2020) yang menyatakan bahwa belanja pemerintah khususnya bidang Pendidikan berpengaruh positif signifikan terhadap peningkatan IPM.

Pembangunan manusia merupakan bagian dari pembangunan ekonomi, sehingga dalam mencapai hal tersebut berbagai faktor penghambat pembangunan harus segera diselesaikan baik oleh pemerintah pusat maupun daerah. Faktor yang paling jelas terlihat pasca pandemi covid - 19 yang dirasakan oleh masyarakat provinsi Bali adalah pengangguran. Pengangguran merupakan faktor yang dapat mengganggu kualitas pembangunan manusia, semakin tinggi pengangguran disuatu daerah akan menurunkan kualitas IPM yang merupakan indikator kesejahteraan daerah tersebut (Priambodo, 2021). Pernyataan tersebut juga didukung oleh penelitian oleh (Hannan et al.,



2023) yang menyatakan bahwa hubungan erat pengangguran dan IPM bersifat negatif dan harus sebisanya ditanggulangi agar tujuan pembangunan manusia dan ekonomi dapat tercapai.

Berdasarkan latar belakang, uraian tinjauan pustaka elaborasi penelitian terdahulu dan penjelasan keterkaitan variabel maka dapat dirancang suatu kerangka konsep dan hipotesis penelitian sebagai berikut.



**Gambar 3 Kerangka Konsep Penelitian**

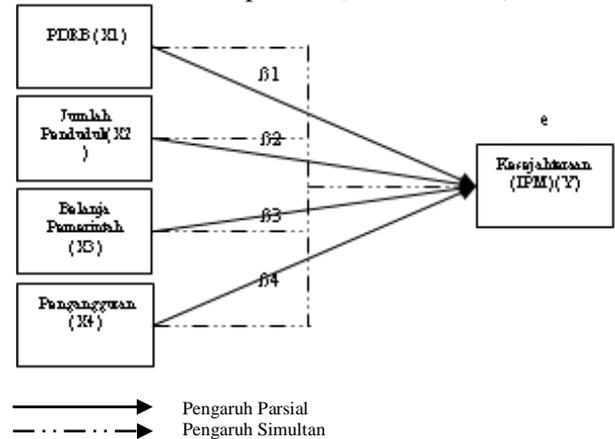
Sumber : Data Diolah (2024)

Rancangan hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Diduga PDRB, jumlah penduduk, dan belanja pemerintah berpengaruh positif signifikan dan pengangguran berpengaruh negatif signifikan terhadap kesejahteraan.

**METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dimulai dengan penentuan topik, fokus, dan fenomena, serta studi empiris yang dilakukan pada hasil - hasil penelitian sebelumnya. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif menggunakan pendekatan asosiatif yang terdiri dari variabel eksogen (variabel independen) (Y) yaitu kesejahteraan dan variabel endogen (variabel dependent) PDRB (X<sub>1</sub>), jumlah penduduk (X<sub>2</sub>), belanja pemerintah (X<sub>3</sub>) dan pengangguran (X<sub>4</sub>). Penelitian ini dilakukan di Provinsi Bali (9 kabupaten kota) selama periode 2013 – 2022. Untuk mendapatkan hasil estimasi yang lebih baik, digunakan 90 sampel pengamatan (data panel). Perhitungan sampel, 9 Kabupaten Kota × 10 tahun amatan 2013 - 2022

= 90. Dalam mengantisipasi eliminasi variabel, data panel memiliki kuantitas observasi tinggi. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dokumentasi *non – prilaku* (Aksara, 2021).



**Gambar 4 Model Analisis**

Sumber : Data Diolah (2024)

Berdasarkan rancangan model analisis seperti pada Gambar 4 berikut persamaan struktural pada penelitian ini.

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

Keterangan

Y = kesejahteraan (IPM)

A = konstanta

X<sub>1</sub> = PDRB,

X<sub>2</sub> = jumlah penduduk

X<sub>3</sub> = belanja pemerintah

X<sub>4</sub> = pengangguran

β<sub>1</sub>–β<sub>4</sub> = koefisien regresi X dan Y

e = error

Program *Econometric Views (Eviews) 12* (regresi data panel) merupakan *software* yang digunakan untuk menguji hipotesis pada penelitian ini. Tiga model, *Common Effect Model (CEM)*, *Fixed Effect Model (FEM)*, dan *Random Effect Model (REM)*, digunakan untuk melakukan metode estimasi. Uji F dan t digunakan menguji pengaruh simultan dan parsial. Uji determinasi untuk menentukan seberapa jauh model dapat menjelaskan variasi oleh penggunaan variabel (Ismanto & Pebruary, 2021).

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Deskripsi Data Hasil Penelitian**

**Tabel 1. Statistik Deskriptif**

N		Terendah	Tertinggi	Rata - Rata	Estándar Deviasi
IPM	90	0,005	0,018	0,007	0,005
PDRB	90	0,892	1,117	0,134	0,274
Jml. Penduduk	90	0,166	0,199	0,037	0,046
Blj. Pemerintah	90	0,078	0,873	0,447	0,521
Pengangguran	90	0,036	0,723	0,337	0,411



Sumber : Data Diolah (2024)

Tabel 1 menunjukkan terdapat 90 amatan (N). Seluruh variabel memiliki nilai rata - rata < nilai standar deviasiyang artinya sebaran data memiliki variasi yang beragam. Kemudian untuk variabel IPM dengan nilai rata - rata  $0,007 >$  nilai standar deviasi artinya variabel IPM memiliki

sebaran data yang rendah.

**Uji Regresi Data Panel**

Model teknik data panel dilakukan dengan tiga metode, hasil ketiga uji tersebut dapat dilihat pada Tabel 2

2

**Tabel 2. Uji CEM, FEM dan REM**

CEM				
Variabel	Coefficient	Std.Error	t-Statistic	Prob.
Konstanta	-0,011	0,007	-1,566	0,121
PDRB	5,608	0,867	6,472	0,000
Jml. Penduduk	0,068	0,013	5,082	0,000
Blj. Pemerintah	7,403	0,668	7,563	0,000
Pengangguran	0,032	0,011	4,071	0,000
FEM				
Variabel	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
Konstanta	-0,015	0,007	-1,971	0,052
PDRB	6,069	0,913	6,644	0,000
Jml. Penduduk	0,070	0,014	5,125	0,000
Blj. Pemerintah	8,097	0,822	7,531	0,000
Pengangguran	0,050	0,012	4,115	0,000
REM				
Variabel	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
Konstanta	-0,011	0,007	-1,538	0,128
PDRB	5,608	0,883	6,354	0,000
Jml. Penduduk	0,068	0,014	4,990	0,000
Blj. Pemerintah	5,700	0,733	7,224	0,000
Pengangguran	0,049	0,014	3,887	0,000

Sumber : Data Diolah (2024)

Estimasi CEM, FEM dan REM Tabel 2, PDRB jumlah penduduk, belanja pemerintah dan pengangguran berpengaruh signifikan terhadap IPM nilai probabilitas seluruh variabel bebas

$0,000 < 0,05$ . (Purwanto & Nugroho, 2020). Penentuan metode yang efisien digunakan uji Chow, uji Hausman, dan uji LM

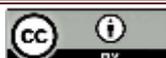
**Tabel 3. Uji Chow, Hausman dan LM**

Uji Chow	
EffectsTest	Prob.
Cross – section Chi - square	0,667
Hausman	
TestSummary	Prob.
Cross – section random	0,101
Uji LM	
	Cross - section
Breusch - Pagan	0,309

Sumber : Data Diolah (2024)

Hasil uji Chow Tabel 3, nilai probabilitas  $0,667 > 0,05$ ,maka  $H_1$  ditolak dan  $H_0$  diterima. Model sementara yang digunakan yaitu CEM. Memilih model terbaik antara FEM dengan REMdilakukan uji Hausman. Hasil uji Hausman Tabel 4, nilai probabilitas  $0,101 > 0,05$ ,maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak. Model sementara yang

digunakan REM. Memilih model terbaik antara REM dengan CEM dilakukan uji LM. Hasil uji LM, nilai probabilitas  $0,309 > 0,05$ ,maka  $H_1$  ditolak dan  $H_0$  diterima. Model yang paling tepat digunakan dalam penelitian adalah CEM (Djaali, 2021)



**Uji Asumsi Klasik**

**Tabel 4. Uji Asumsi Klasik**

Uji Prasyarat	CEM	FEM	REM
Normalitas	×	×	✓
Heteroskedastisitas	✓	✓	×
Multikolinearitas	✓ jika $X > 1$	✓ jika $X > 1$	✓ jika $X > 1$
Autokorelasi	×	×	×

Sumber : (Ismanto & Pebruary, 2021)

CEM model yang digunakan sehingga, uji heteroskedastisitas dan uji multikolinearitas asumsi klasik berdasarkan table 4 terdiri dari uji

**Tabel 5. Uji Heteroskedastisitas**

	Cross - section
PDRB	0,798
Jml. Penduduk	0,097
Blj. Pemerintah	0,889
Pengangguran	0,066

Sumber : Data Diolah (2024)

**Tabel 6. Uji Multikolinearitas**

	X <sub>1</sub>	X <sub>2</sub>	X <sub>3</sub>	X <sub>4</sub>
X <sub>1</sub>	0,76788326	0,06654921	0,78271646	0,01835269
X <sub>2</sub>	0,06654921	0,76788326	0,73819547	0,54271645
X <sub>3</sub>	0,57294792	0,54678251	0,63781546	0,44672814
X <sub>4</sub>	0,00339718	0,66453715	0,05736219	0,04473819

Sumber : Data Diolah (2024)

Probabilitas seluruh variabel Tabel 5 > 0,05 memiliki koefisien korelasi > 0,80 sehingga tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. terbebas dari gejala multikolinieritas  
 Tabel 6 menunjukkan seluruh variabel bebas

**Uji Hipotesis**

**Uji t (Uji Parsial)**

**Tabel 7. Hasil uji t**

Variabel	t-statistik	Prob.
PDRB - IPM	2,999	0,034
Jml. Penduduk - IPM	1,061	0,940
Blj. Pemerintah - IPM	3,296	0,043
Pengangguran - IPM	-2,711	0,009

Sumber : Data Diolah (2024)

Uji Hipotesis 1 : Uji t pada tingkat  $\alpha = 0,05$  diperoleh  $t_{hitung}$  (2,999 > 1,987), nilai probabilitas (0,038 < 0,05) yang artinya PDRB berpengaruh positif signifikan terhadap IPM. Uji Hipotesis 2 : Uji t pada tingkat  $\alpha = 0,05$  diperoleh  $t_{hitung}$  (1,061 < 1,987), nilai probabilitas (0,940 > 0,05) yang artinya jumlah penduduk tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM. Uji Hipotesis 3 : Uji t pada tingkat  $\alpha = 0,05$  diperoleh  $t_{hitung}$  (3,296 > 1,987), nilai probabilitas (0,043 < 0,05) yang artinya belanja pemerintah berpengaruh positif signifikan terhadap IPM. Uji Hipotesis 4 : Uji t pada tingkat  $\alpha = 0,05$  diperoleh  $t_{hitung}$  (-1,711 > -1,987), nilai probabilitas (0,009 < 0,05) yang artinya pengangguran berpengaruh negatif signifikan terhadap IPM

**Tabel 8. Prob (F-Statistic)**

f-statistic	16,578
Prob (f-statistic)	0,000

Sumber : Data Diolah (2024)

$F_{tabel} = 2,48, F_{hitung} = 16,578$

$F_{hitung} = 19,985 > 2,48$  signifikansi = 0,000 < 0,05. Artinya PDRB, jumlah penduduk belanja pemerintah dan pengangguran berpengaruh simultan terhadap IPM



**Tabel 9. Koefisien Determinasi**

<i>Adjusted R-Squared</i>	0,846
---------------------------	-------

Sumber : Data Diolah (2024)

Nilai *Adjusted R – square* = 0,846, artinya 84,6 persen PDRB, jumlah penduduk, belanja pemerintah dan pengangguran bersama - sama mempengaruhi IPM, sisanya 15,4 persen dipengaruhi oleh variabel lain diluar model.

## PEMBAHASAN

Berdasarkan uji hipotesis yang dilakukan terbukti bahwa pertama, PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan berdasarkan IPM. Hal ini berarti bahwa peningkatan PDRB di Provinsi Bali akan meningkatkan kualitas IPM. Laju pertumbuhan PDRB sebagai indikator pertumbuhan ekonomi, idealnya menunjukkan pertumbuhan yang positif, dengan kontribusi berbagai sektor usaha. Harapannya tidak hanya bergantung pada sektor pariwisata saja, kedepannya pertumbuhan sektor lainnya yang potensial seperti pertanian, UMKM dapat dikembangkan. Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Rinawati et al., 2022) dan (Taqi et al., 2021) yang menyatakan bahwa hubungan antara PDRB dan IPM berpengaruh signifikan.

Kedua hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa, jumlah penduduk tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan berdasarkan IPM. Hal ini berarti bahwa peningkatan jumlah penduduk tidak berdampak terhadap peningkatan IPM yang disebabkan oleh belum meratanya akses terhadap pendidikan, kesehatan dan pendapatan yang layak di beberapa wilayah Provinsi Bali. Idealnya pertumbuhan populasi penduduk seyogyanya berbanding lurus terhadap kualitas manusia, tentunya dengan kesediaan dan jaminan dari pemerintah bahwa masyarakat akan mendapatkan kesetaraan secara ekonomi sehingga akan berdampak terhadap kualitas SDM.

Ketika kondisi ketimpangan dan disparitas ekonomi masih terjadi antar daerah kabupaten dan kota satu dengan yang lainnya, maka dapat dipastikan pertumbuhan penduduk hanya akan menjadi beban demografi. Dasar pernyataan tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan (Khadijah et al., 2022) dan (Adim, 2021) yang menyatakan bahwa pertumbuhan populasi jumlah penduduk tidak selalu diikuti oleh peningkatan kualitas IPM, apabila akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, pendapatan dan lapangan kerja belum merata Sehingga dalam menciptakan pertumbuhan populasi yang berkualitas,

ketimpangan antar daerah harus dikendalikan terlebih dahulu agar jurang disparitas tidak terlalu tinggi.

Pembahasan hipotesis yang ketiga terkait belanja yang dilakukan pemerintah daerah yang terbukti berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas kesejahteraan berdasarkan IPM. Belanja pemerintah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kabupaten dan kota di Provinsi Bali berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan kualitas IPM. Artinya bahwa peningkatan belanja pemerintah untuk kepentingan peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan dan investasi perluasan lapangan kerja, akan mampu meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat Bali yang dapat dilihat dari peningkatan IPM. Hal ini mendukung penelitian sebelumnya oleh (Sidabutar et al., 2020) dan (Rahmawati & Intan, 2020).

Kemudian berikutnya hasil uji hipotesis keempat menyatakan, tingkat pengangguran yang terjadi pada wilayah kabupaten kota di Provinsi Bali berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kualitas kesejahteraan berdasarkan IPM. Artinya bahwa semakin tinggi jumlah pengangguran akan menurunkan kualitas kesejahteraan masyarakat berdasarkan IPM dan sebaliknya. Tingginya jumlah pengangguran menunjukkan bahwa serapan tenaga kerja rendah. Penyebabnya antara lain, sempitnya lapangan kerja, kompetensi yang tidak sesuai dan fenomena yang paling memicu adalah covid - 19, yang menyebabkan resesi dan banyak tenaga kerja yang dirumahkan. Hal ini kemudian berpengaruh terhadap penurunan kualitas hidup masyarakat Bali berdasarkan IPM Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya oleh (Priambodo, 2021) dan (Hannan et al., 2023)

## KESIMPULAN

Hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut : PDRB dan belanja pemerintah, berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas IPM di Provinsi Bali 2013 - 2022. Pertumbuhan jumlah penduduk tidak berpengaruh terhadap kualitas IPM di Provinsi Bali 2013 - 2022. Tingkat pengangguran berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kualitas IPM di Provinsi Bali 2013 - 2022. Saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :



Alokasi belanja pemerintah daerah Provinsi Bali hendaknya diprioritaskan untuk mengembangkan sektor ekonomi yang potensial seperti pertanian, UMKM dan ekonomi kreatif serta memberikan dukungan penuh kepada pelaku usaha lokal. sehingga pertumbuhan PDRB tidak hanya didominasi oleh sektor pariwisata namun didukung oleh sektor riil. Apabila hal tersebut mampu direalisasikan akan berdampak terhadap peningkatan lapangan kerja dan pemerataan pendapatan. Akses pendapatan yang merata, penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pendidikan, kesehatan dan lapangan kerja, untuk menciptakan IPM yang berkualitas.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adim, A. (2021). Pengaruh Jumlah Penduduk dan Pendapatan Perkapita Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM)(Provinsi Jawa Timur Periode 2017 - 2019). *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 22(1), 1–11.
- Agustina, E., Syechalad, M. N., & Hamzah, A. (2018). Pengaruh jumlah penduduk, tingkat pengangguran dan tingkat pendidikan terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam (Darussalam Journal of Economic Perspec*, 4(2), 265–283.
- Aksara, P. T. B. (2021). Metodologi penelitian kuantitatif. Bumi Aksara.
- Azriyansyah, Z. (2022). Analisis Pengaruh IPM, PDRB Dan Tingkat Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Indonesia Periode Tahun 2017–2021. *Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Manajemen*, 1(3), 225–238.
- Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia. (2023). Provinsi Bali Dalam Angka 2023, Retrieved from Badan Pusat Statistik Provinsi Bali.
- Bakar, A. (2020). Analisis pengaruh pengeluaran konsumsi rumah tangga dan pengeluaran pemerintah terhadap indeks pembangunan manusia kabupaten mimika. *Jurnal Kritis (Kebijakan, Riset, dan Inovasi)*, 4(2), 16–38.
- Darnawaty, F., & Purnamasari, N. (2019). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pertumbuhan Penduduk, dan Aspek Pendidikan terhadap IPM di Sumatera Utara. *Ekombis Sains: Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Bisnis*, 4(2), 103–112.
- Djaali, H. (2021). Metodologi Penelitian Kuantitatif.
- Hadi Ismanto, S. E., & Pebruary, S. (2021). Aplikasi SPSS dan Eviews dalam analisis data penelitian. Yogyakarta: Deepublish.
- Hannan, Z., Jacob, J., Niam, S. K., Dewi, S., & Nashih, M. (2023). The Effect Of Unemployment, Economic Growth, Level Of Education On The Human Development Index With Poverty As Mediation. *Jurnal Ilmiah Edunomika*, 8(1).
- Jasasila, J. (2020). Pengaruh tingkat kemiskinan dan jumlah penduduk terhadap indeks pembangunan manusia (IPM) Kabupaten Batang hari 2011-2019. *Eksis: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, 11(1), 40–44.
- Kasna, I. K. (2020). Dampak Pengangguran Kemiskinan Dan Konsep Teoritisnya Pada Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmiah Cakrawarti*, 3(2), 58–61.
- Khadijah, S., Saharudddin, S., Anwar, K., & Murtala, M. (2022). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Jumlah Penduduk Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Simalungun. *Jurnal Aplikasi Ilmu Ekonomi*, 1(1), 74–82.
- Kiha, E. K., Seran, S., & Lau, H. T. (2021). Pengaruh jumlah penduduk, pengangguran, dan kemiskinan terhadap indeks pembangunan manusia (ipm) di kabupaten belu. *Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*, 2(07), 60–84.
- Mahroji, D., & Nurkhasanah, I. (2019). Pengaruh indeks pembangunan manusia terhadap tingkat pengangguran di Provinsi Banten. *Jurnal Ekonomi-Qu*, 9(1).
- Menyimak Diferensiasi Perekonomian Global Pasca Covid-19 \_ Infobanknews. (t.t.).
- Ningrum, J. W., Khairunnisa, A. H., & Huda, N. (2020). Pengaruh kemiskinan, tingkat pengangguran, pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah terhadap indeks pembangunan manusia (IPM) di Indonesia tahun 2014-2018 dalam perspektif Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(2), 212–222.
- Oktaviana, D., Supada, W., & Suweca, I. K. (2023). Determinasi Prinsip Ekonomi Kerthi Bali Pada Sektor UMKM di Desa Nagasepaha Kabupaten Buleleng. *Ekuitas: Jurnal Pendidikan Ekonomi*,



- 11(2).
- Palayukan, M. (2019). Pengaruh belanja pemerintah terhadap indeks pembangunan manusia: studi kasus Provinsi Sulawesi Tenggara. *Jurnal BPPK: Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan*, 12(2), 74–91.
- Prakasa, G. S., & Suparyati, A. (2022). Dampak Efektivitas Dan Efisiensi Belanja Pemerintah Daerah Sektor Kesehatan Dan Ekonomi Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Pulau Jawa. *Media Ekonomi*, 30(1), 17–30.
- Priambodo, A. (2021). The impact of unemployment and poverty on economic growth and the human development index (HDI). *Perwira International Journal of Economics & Business*, 1(1), 29–36.
- Purwahita, A. A. A. R. M., Wardhana, P. B. W., Ardiasa, I. K., & Winia, I. M. (2021). Dampak Covid-19 terhadap Pariwisata Bali Ditinjau dari Sektor Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan (Sebuah Tinjauan Pustaka). *Jurnal Kajian Dan Terapan Pariwisata*, 1(2), 68–80.
- Purba, W., Nainggolan, P., & Panjaitan, P. D. (2022). Analisis Pengaruh Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pengangguran di Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Ekuilmn*, 4(1), 62–74. <https://doi.org/10.36985/ekuilmn.v4i1.336>
- Purwanto, E., & Nugroho, P. W. (2020). *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Putri, L. R. (2020). Pengaruh pariwisata terhadap peningkatan PDRB Kota Surakarta. *Cakra Wisata*, 21(1).
- Putri, N. A. A., Anggeraini, F., & Desmawan, D. (2023). Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Banten. *JETISH: Journal of Education Technology Information Social Sciences and Health*, 1(1), 64–70.
- Rahmawati, F., & Intan, M. N. (2020). Government Spending, Gross Domestic Product, Human Development Index (Evidence from East Java Province). *KnE Social Sciences*, 774–786.
- Ramadanisa, N., & Triwahyuningtyas, N. (2022). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Lampung. *Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, dan Pendidikan*, 1(7), 1049–1062.
- Rinawati, Y., Miftitah, F. A. N., Aldianto, F. A., Faj'ri, M. H., & Sujianto, A. E. (2022). Pengaruh PDRB, Kemiskinan, dan Jumlah Penduduk Terhadap IPM di Provinsi Jawa Timur Tahun 2017-2021. *Jurnal Ecogen*, 5(4), 517–527.
- Sari, E., & Yusniar, R. (2019). Analisis Determinan Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Bali Tahun 2010-2017. *Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan)*, 4(2), 128–136.
- Sanniana Sidabutar, Elidawaty Purba, & Pauer Darasa Panjaitan. (2020). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan Dan Kemiskinan Terhadap IPM Kabupaten Simalungun. *Jurnal Ekuilmn*, 2(2), 86–101. <https://doi.org/10.36985/ekuilmn.v2i2.109>
- Sidabutar, S., Purba, E., & Panjaitan, P. D. (2020). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan Dan Kemiskinan Terhadap IPM Kabupaten Simalungun. *Jurnal Ekuilmn*, 2(2), 86–101.
- Sinaga, M., Damanik, S. W. H., Zalukhu, R. S., Hutaaruk, R. P. S., & Collyn, D. (2023). Pengaruh Pendidikan, Pendapatan Per Kapita Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Kepulauan Nias. *Jurnal Ekuilmn*, 5(1), 140-152
- Statistik, B. P. (2020). Indeks pembangunan manusia. Retrieved Februari, 18.
- Suhandi, N., Putri, E. A. K., & Agnisa, S. (2018). Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Jumlah Kemiskinan Menggunakan Metode Regresi Linear di Kota Palembang. *Jurnal Ilmiah Informatika Global*, 9(2).
- Suhandi, S., Wiguna, W., & Quraysin, I. (2021). Dinamika Permasalahan Ketenagakerjaan Dan Pengangguran Di Indonesia. *Jurnal Valuasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Manajemen Dan Kewirausahaan*, 1(1), 268–283.
- Sutono, I. A. (2022). Pengaruh belanja pemerintah terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Riau. *Jurnal Manajemen Perbendaharaan*, 3(2), 150–168.
- Taqi, M., e Ali, M. S., Parveen, S., Babar, M., & Khan, I. M. (2021). An analysis of Human Development Index and



- 
- Economic Growth. A Case Study of Pakistan. *iRASD Journal of Economics*, 3(3), 261–271.
- Tarigan, W. J. (2020). Pengaruh Pendapatan Domestik Regional Bruto Perkapita Dan Rasio Beban Ketergantungan Hidup Terhadap Tabungan Domestik Sumatera Utara. *Jurnal Ekuilmomi*, 2(2), 135-148
- Utami, F. P. (2020). Pengaruh indeks pembangunan manusia (IPM), kemiskinan, pengangguran terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh. *Jurnal Samudra Ekonomika*, 4(2), 101–113.
- Wijayanto, H., & Olde, S. (2020). Dinamika Permasalahan Ketenagakerjaan Dan Pengangguran Di Indonesia. *Jurnal Bina Bangsa Ekonomika*, 13(1), 85–94.
- Yoga, G. A. D. M., & Diputra, G. I. S. (2024). Analisis Data Panel Determinan Kemiskinan Melalui Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Bali. *Jurnal Ekuilmomi*, 6(1), 1–15.